

**ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH
DI PROVINSI JAMBI
(PENDEKATAN ENTROPY THEIL INDEKS)**

Siti Aminah¹

Abstract

This research aims to know the economic growth of the kabupaten/kota in Jambi province and to find out the economic gaps between areas in Jambi province by using the index and the Theil Entropy model using data GDP as well as the total population of the year 2011 till the year 2015. The results obtained on a regional basis the rate of development of GDP experienced a fluctuation of the years 2011 to 2015 average of 6.79%. During the period that shows the rate of economic growth was the highest average of Sarolangun Regency 7.43%. Theil Entropy of the approach over a period of years 2011 to 2015 year average index of inequalities between different areas in Jambi province is 0.426 this value indicates the index of the gap.

Keyword: income disparity, economic growth

PENDAHULUAN

Disparitas pendapatan antar daerah merupakan masalah pembangunan dalam konsep pembangunan nasional maupun pembangunan regional. Pada tahap awal pembangunan ekonomi nasional, perbedaan laju pertumbuhan pendapatan regional yang cukup besar antar wilayah, telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang ketika faktor produksi bergerak perbedaan laju pertumbuhan output antar wilayah cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata antar wilayah.

Disparitas regional di Indonesia disebabkan antara lain oleh kebijakan yang diterapkan pada Undang-Undang (UU) no. 5 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat menguasai dan mengontrol hampir semua pendapatan daerah yang meliputi pendapatan dari hasil kekayaan alam di sektor pertambangan, minyak bumi, gas, hutan dan perkebunan. Sumber-sumber tersebut ditetapkan sebagai penerimaan Negara.

Akibatnya daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak menikmati hasilnya secara layak.

Dengan diberlakukan dan diterapkannya Undang-undang otonomi daerah no. 32 tahun 2004, maka daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi daerah, terutama dalam merumuskan dan sekaligus mengimplementasikan penggunaan sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya diarahkan pada peningkatan, perluasan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mendorong pemerataan serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sehingga diharapkan dapat mempertinggi kesejahteraan social masyarakat.

Salah satu indikator penting yang dapat dilihat dari pembangunan ekonomi daerah, terutama untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh daerah

¹ Dosen Universitas Jambi

dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, adalah dengan memperhatikan struktur perekonomian melalui kajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tujuan Penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2015. 2) Untuk mengetahui perkembangan pendapatan perkapita kabupaten/kota di provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2015. 3) Untuk mengetahui disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan output riil ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kestabilan politik, kebijakan ekonomi, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan kerja, tersedianya usahawan yang mempunyai kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern.

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan kekayaan alam
Kekayaan alam merupakan modal untuk membangun perekonomian

suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan maka pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja dan akan meningkatkan produksi dan luas pasar jika diiringi dengan produktivitas yang tinggi. Pertambahan penduduk berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Kemajuan teknologi menimbulkan akibat-akibat positif dalam pertumbuhan ekonomi, di antaranya menimbulkan penemuan barang-barang baru, menambah jumlah barang dan jasa yang digunakan masyarakat dan dapat meningkatkan mutu barang yang diproduksi.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) tercapai bila terdapat peningkatan perbandingan antar input dan output yang lebih besar serta adanya perkembangan ekonomi. Jadi adanya kenaikan output per satuan input dapat menghasilkan output yang lebih besar. Ini artinya adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas (Todaro, 2000)

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat

tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari suatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana kedalam sistem ekonomi suatu negara.

Berikut ini beberapa teori yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi antara lain:

1) Teori Harrod-Domar (H-D)

Teori ini pada dasarnya berusaha memadukan pandangan kaum Klasik yang dianggap terlalu menekankan pada sisi penawaran (*Supply Side*) dan pandangan Keynes yang lebih menekankan pada sisi permintaan (*demand side*). Harrod-Domard mengatakan bahwa investasi memainkan peran ganda. Disatu sisi investasi akan meningkatkan kemampuan produktif (*productive capacity*) dalam perekonomian, sementara disisi lain investasi juga akan menciptakan permintaan (*demand creating*) di dalam perekonomian. Oleh kerena itu, H-D menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penentu yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Aspek yang dikembangkan adalah aspek yang menyangkut peranan investasi (I) dalam jangka panjang. Dalam teori Keynes, pengeluaran investasi (I) mempengaruhi permintaan agregat (D) tetapi tidak mempengaruhi penawaran agregat (S). Menurut H-D, pengeluaran investasi tidak hanya berpengaruh (lewat proses multipliher) terhadap permintaan agregat (D), tetapi juga terhadap permintaan agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas

produksi. Secara sederhana kaitan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi dalam versi model H-D dapat dinyatakan sebagai berikut:

2) Teori Pertumbuhan Solow

Model pertumbuhan Solow memperlihatkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Seperti halnya kebanyakan model pertumbuhan lainnya, model Solow juga menganggap bahwa penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan penting dalam suatu perekonomian. Secara teoritis, penawaran barang didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa persediaan output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja.

Modal dalam bentuk investasi akan diperoleh dari tabungan. Tabungan yang tinggi juga bukan suatu hal yang bagus jika tidak diinvestasikan. Tugas pembuat kebijakan adalah menetapkan tingkat tabungan yang ideal atau tingkat kondisi mapan dalam perekonomian. Tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu.. Nilai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi inilah yang disebut tingkat midal kaidah emas (*Golden Rule Level of Capital*) (Mankiw dalam Haryadi, 2007).

3) Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)

Model yang telah dikembangkan oleh para ahli terdahulu tidak memberikan jawaban yang memuaskan tentang pertumbuhan

ekonomi. Dalam teori Modern, faktor-faktor yang krusial tidak hanya L dan K, tetapi juga pertumbuhan T), E, Kewirausahaan (Kw), bahan baku (BB), dan material (Mt). Selain itu faktor lain yang oleh teori modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan dasar tukar internasional (TOT).

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Suatu wilayah atau region dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari masa sebelumnya. Dengan kata lain perkembangan tercipta apabila jumlah fisik ataupun nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian akan bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pola pertumbuhan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 1) sumber daya alam, 2) investasi (modal) untuk pengelolaan sumber daya alam, 3) teknologi yang tepat untuk pengelolaannya, 4) sumber daya manusia, 5) prasarana dan sarana penunjang aktivitas ekonomi. (Santoso, 1989)

Menurut Sjafrizal (2008) pertumbuhan ekonomi regional dibedakan menjadi empat kelompok yang masing-masing didasarkan pada asumsi yang berbeda. Kelompok pertama dinamakan sebagai Model Basis Ekspor (Export Base Model), pendekatan ini dikemukakan oleh Douglas C North dimana kelompok ini menyatakan bahwa tumbuhnya perekonomian wilayah disebabkan karena adanya lokasi-lokasi strategis yang dimiliki oleh setiap wilayah.

Lokasi strategis yang dimiliki setiap wilayah berbeda, hal ini disebabkan karena di setiap wilayah mempunyai sumber daya dan keadaan geografis yang berbeda.

Dalam pemahaman ini juga yang dimaksud dengan sektor basis adalah sektor atau lapangan usaha yang dianggap bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah (Robinson, 2004). Lebih jauh diungkapkan bahwa analisis basis dan non basis pada dasarnya dapat dilihat dari sisi nilai tambah (pendekatan produksi) dan dari sisi penciptaan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Ini dapat menghasilkan pengertian misalnya penggabungan antara lapangan kerja basis dan non basis merupakan total lapangan kerja yang tersedia untuk wilayah tersebut, sedangkan penjumlahan pendapatan sektor basis dan sektor non basis merupakan total pendapatan wilayah tersebut. Sektor basis ini yang harus dikelola dan dikembangkan secara optimal dalam rangka memberikan efek multiplier baik langsung maupun tidak langsung paling tidak untuk pendapatan wilayah (regional income) dan kesempatan kerja wilayah (regional employment multiplier).

Pengembangan lebih lanjut dari pendekatan basis ini dengan sangat fenomenal dilakukan oleh Douglas C North dan Tiebout kemudian dimodifikasi oleh Richardson melalui teori basis ekspor (export base theory). Teori ini beranggapan bahwa ekspor merupakan tonggak utama untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori ekspor base ini mendasarkan pandangannya pada sudut teori lokasi. Kelompok ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (region) akan lebih banyak

ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut umumnya berbeda-beda pada setiap wilayah dan hal ini akan sangat tergantung dengan keadaan geografi pada daerah setempat.

Menurut Todaro (2003) ada 3 komponen utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Komponen yang dimaksud adalah : 1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal dan sumber daya manusia; 2) pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja; 3) kemajuan teknologi (technological progress).

Suatu pernyataan yang banyak mendapat tanggapan dari pihak lain yaitu pernyataan Neo-klasik yang menyatakan secara tegas bahwa pada awal proses pembangunan di suatu negara (negara sedang berkembang) akan terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah yang tinggi sehingga timbul suatu kondisi divergence (ketimpangan tinggi), pada saat pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan sendirinya, ketimpangan antar wilayah akan mengecil yang dikenal dengan convergence (ketimpangan rendah). Divergensi terjadi karena pada awal proses pembangunan ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur social ekonomi sangat terbatas terutama untuk wilayah-wilayah terpencil sehingga pertumbuhan ekonomi sangat lamban.

Kelompok ketiga dinamakan Cummulative Causation Models yang dipelopori oleh Gunnar Myrdal. Pada prinsipnya ia menolak apa yang

menjadi pola pikir Neoklassik, bahwa ia tidak percaya dengan sendirinya ketimpangan dalam proses pembangunan akan berkurang apabila pembangunan ekonomi sudah berada pada jalur yang tepat.

Kelompok keempat dinamakan Core Periphery Models yang dipelopori oleh Friedmann. Kelompok ini mengemukakan bahwa ada interaksi yang kuat anta kota (core) dan desa (periphery). Pembangunan wilayah perkotaan akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan atau profil wilayah-wilayah yang ada disekitarnya, begitu juga pembangunan wilayah pedesaan sangat dipengaruhi oleh pembangunan wilayah perkotaan. Dengan demikian akan terjadi proses linkage pembangunan (keterkaitan pembangunan).

Disparitas Pendapatan Wilayah

Evolusi atau perubahan kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh hipotesis Kuznets. Dengan menggunakan data antar negara (cross section) dan data dari sejumlah observasi runtun waktu (time series) setiap negara, Simon Kuznets menemukan suatu hubungan berbentuk U terbalik (inverted U Hypotesis) antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan antar daerah. Pembangunan ekonomi di daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi rendah. Begitu pula konsentrasi penduduk di dalam dan di sekitar kota-kota besar

biasanya diikuti dengan adanya disparitas penduduk antar daerah.

Menurut Tulus (2001) faktor-faktor yang menyebabkan terjadi kesenjangan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesar, sedangkan daerah dengan konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

2. Alokasi Investasi

Menurut Harrod-Domar menerangkan bahwa ada korelasi positif antar tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa investasi rendah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat rendah karena rendahnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Rendah Antar Daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital, merupakan faktor penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi regional. Realisasi antara mobilitas faktor produksi dan perbedaan tingkat pembangunan atau pertumbuhan antar daerah dapat lebih jelas dipahami dengan pendekatan analisis mekanisme pasar output dan pasar input.

4. Perbedaan Sumber Daya Alam

Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya

sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakat lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam.

5. Perbedaan Kondisi Demografis

Kurang Lancarnya Perdagangan

Kesenjangan ekonomi regional juga disebabkan perbedaan kondisi demografis antar daerah, terutama dalam pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder dengan mengumpulkan data berupa runtutan waktu (time series) tahun 2011 – 2015 yang kemudian data tersebut dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh instansi terkait. Jenis data yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2011 – 2015

2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2011 – 2015

Data dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga atau instansi resmi pemerintah dan dari situs-situs internet yang telah diolah lebih lanjut, seperti:

1. Badan Pusat Statistik

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Metode Analisis Data

1) Pertumbuhan Ekonomi (G)

Untuk menjawab masalah pertama digunakan analisis deskriptif dengan menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi yaitu :

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

G : Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t : PDRB pada tahun sekarang

PDRB_{t-1} : PDRB pada tahun sebelumnya

2) Pendapatan Perkapita

Untuk menjawab permasalahan kedua maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$Y/Cap = \frac{PDRB}{JumlahPenduduk}$$

3) Koeffisien Theil

Koeffisien Theil merupakan indeks yang digunakan untuk menganalisis distribusi spasial. Koeffisien Theil dapat dikomposisi menjadi disparitas between (antara) dan disparitas within (dalam) wilayah. Menurut Ying dalam Wijayanti (2004) Koeffisien Theil diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{Theil} = \sum (y_i / Y) \times \log (y_i / Y) / (x_i / X)$$

Dimana:

I Theil : Kesenjangan ekonomi antar daerah

y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota ke i

x_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota ke i

Y : Rata-rata PDRB perkapita provinsi Jambi

X : Jumlah penduduk provinsi Jambi

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2011-2015

Sebagai salah satu wilayah yang tengah memacu dan mendorong proses pembangunan ekonominya, provinsi Jambi dewasa ini berupaya untuk menjadikan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya guna mempercepat dan memelihara kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan kenaikan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kaitan ini, sektor-sektor yang berperan utama terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto dalam perekonomian provinsi Jambi selama periode analisis 2011 – 2015 adalah sektors-sektor : (1) sektor pertanian, (2) sektor industri pengolahan, (3) sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Secara regional laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun 2011 – 2015 rata-rata sebesar 6,79%. Selama periode tersebut yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi adalah kabupaten Sarolangun 7,43% kemudian diikuti oleh kabupaten Muaro Jambi sebesar 7,26% kabupaten Batang Hari sebesar 7,01% kabupaten Kerinci sebesar 6,95% kabupaten Tebo 6,92% kabupaten Tanjab Barat sebesar 6,71%. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi Jambi adalah kabupaten Tanjab Timur sebesar 5,23 % dan kabupaten Merangin sebesar 6,47%.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011 - 2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Kerinci	5.69	6.55	6.44	9.63	6.45	6.95
2.Merangin	7.02	6.47	6.45	6.95	5.48	6.47
3.Sarolangun	8.8	7.98	7.94	8.86	3.59	7.43
4.Batang Hari	8.8	7.13	6.84	8.02	4.26	7.01
5.Muaro Jambi	7.9	7.25	7.69	8.23	5.24	7.26
6.Tanjab Timur	6.83	7.44	4.09	5.92	1.87	5.23
7.Tanjab Barat	7.85	7.68	7.55	6.51	3.98	6.71
8.Tebo	6.78	6.73	6.51	9.28	5.28	6.92
9.Bungo	7.68	7.51	6.67	6.35	5.13	6.67
10.Kota Jambi	6.97	7.05	7.76	6.64	5.56	6.80
11.Kota Sungai Penuh	6.73	6.93	6.92	6.35	7.06	6.80
12. Provinsi Jambi	7.86	7.03	7.07	7.76	4.21	6.79

Sumber : BPS (data diolah)

Struktur ekonomi pada sebagian besar kabupaten/kota di provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran.

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode

Pendapatan penduduk kabupaten/kota di provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Secara rata-rata pendapatan perkapita provinsi Jambi dari tahun 2011 – 2015 sebesar Rp 41.059.000,-. Secara pendekatan wilayah urutan yang tertinggi yaitu Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 77.923.267,-, Tanjung Jabung Timur Rp 75.710.714,-. Kota Sungai Penuh Rp 42.355.511,- pendapatan perkapita di atas pendapatan perkapita provinsi Jambi.

Pendapatan perkapita di Tanjung Jabung Timur terbesar didominasi oleh sektor pertambangan, setelah itu baru sektor pertanian. Sedangkan wilayah Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo dan Kota Jambi memiliki pendapatan perkapita di bawah pendapatan perkapita provinsi Jambi.

Berdasarkan tabel 2 pendapatan perkapita rata-rata yang terendah adalah kabupaten Merangin yaitu sebesar Rp 22.381.737,- kabupaten Kerinci sebesar Rp 22.975.728,- kabupaten Tebo sebesar Rp 23.743.528,-.

Struktur perekonomian di kabupaten Merangin, kabupaten Kerinci, kabupaten Tebo didominasi oleh sektor pertanian.

**Tabel 2. PDRB Perkapita kabupaten/kota Provinsi Jambi
Periode 2011- 2015 (rupiah)**

Kabupaten / Kota		2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kerinci	14,953,451	20,070,726	23,098,551	26,665,271	30,090,640	22,975,728
2	Merangin	11,296,617	21,611,374	23,919,212	26,332,085	28,749,397	22,381,737
3	Sarolangun	18,489,457	32,162,916	35,451,908	38,168,019	40,170,191	32,888,498
4	Batang Hari	19,005,250	34,699,304	38,594,992	42,694,464	46,281,596	36,255,121
5	Muaro Jambi	13,177,643	32,148,978	35,958,557	39,616,595	42,710,430	32,722,441
6	Tanjab Timur	49,389,222	74,996,711	82,379,878	88,545,857	83,241,904	75,710,714
7	Tanjab Barat	27,486,747	82,010,830	89,995,492	95,396,036	94,727,231	77,923,267
8	Tebo	10,140,080	22,864,571	25,853,179	28,429,973	31,429,835	23,743,528
9	Bungo	15,303,277	30,035,235	32,512,024	35,110,296	37,784,361	30,149,039
10	Kota Jambi	19,381,167	26,500,971	29,604,249	33,404,897	37,005,484	29,179,354
11	Kota Sungai Penuh	20,600,467	39,776,767	44,152,727	50,040,269	57,207,325	42,355,511
12	Provinsi Jambi	32,729,000	35,658,000	40,175,000	46,004,000	50,729,000	41,059,000

Sumber : BPS (data diolah)

Indeks Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Jambi Periode

Berdasarkan data pendapatan perkapita dan jumlah penduduk dengan menggunakan model Entropy Theil yaitu untuk melihat ukuran kesenjangan ekonomi antar daerah di provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Indeks Kesenjangan Antar Daerah di Provinsi Jambi
Periode 2011- 2015**

No	Tahun	Indeks Kesenjangan
1	2011	0,394
2	2012	0,401
3	2013	0,397
4	2014	0,480
5	2015	0,460
Rata-rata		0,426

Sumber : BPS (data diolah)

Dari tabel terlihat bahwa nilai indeks Williamson (iw) terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 0,394 sedangkan nilai iw tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 0,480. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa antar kabupaten/ kota di Provinsi Jambi terjadi ketimpangan pendapatan yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan kemampuan tiap daerah juga faktor pemilikan sumber

daya alam dan persebaran penduduk yang berimplikasi terhadap nilai tambah bruto (PDRB) dalam perekonomian antar daerah di Provinsi Jambi beberapa kabupaten seperti Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo dan Kota Jambi memiliki sumber migas sementara kabupaten lainnya tidak memiliki migas. Seperti diketahui, komoditas migas produksinya agak sulit diprediksi, begitu juga dengan harganya. Pada beberapa tahun terakhir harga migas dunia berfluktuatif hal ini berdampak pada melonjaknya nilai tambah migas sekaligus nilai PDRB ADHB pada wilayah yang memiliki migas.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa:

1. Secara regional laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun 2011 – 2015 rata-rata sebesar 6,79%. Selama periode tersebut yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi adalah kabupaten Sarolangun 7,43% kemudian diikuti oleh kabupaten Muaro Jambi sebesar 7,26% kabupaten

- Batang Hari sebesar 7,01% kabupaten Kerinci sebesar 6,95% kabupaten Tebo 6,92% kabupaten Tanjab Barat sebesar 6,71%. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi Jambi adalah kabupaten Tanjab Timur sebesar 5,23 % dan kabupaten Merangin sebesar 6,47%.
2. Pendapatan penduduk kabupaten/kota di provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Secara rata-rata pendapatan perkapita provinsi Jambi dari tahun 2011 – 2015 sebesar Rp 41.059.000,-. Secara pendekatan wilayah urutan yang tertinggi yaitu Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 77.923.267,-, Tanjung Jabung Timur Rp 75.710.714,-. Kota Sungai Penuh Rp 42.355.511,- pendapatan perkapita di atas pendapatan perkapita provinsi Jambi.
3. Selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015 secara rata-rata indeks ketimpangan antar daerah di provinsi Jambi adalah sebesar 0,426 , nilai ini menunjukkan bahwa indeks kesenjangan yang tinggi atau melebar.
- Gramedia Pustaka Utama
Jakarta
- Suarni, 2001. Ketimpangan Antar Daerah dari Segi Pendapatan di Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya, Palembang
- Syafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta
- Todaro, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ke Tujuh Penerbit Erlangga Jakarta
- Tulus, 2001. Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris. Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wijayanti D, 2004. Analisis Keserjangan Pembangunan Regional 1992 – 2001. Jurnal EKonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang vol 9. No 2 : 109 - 2005

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. Jambi dalam angka. Badan Pusat Statistik Provinsi 2011 - 2015
- Robinson T, 2004. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Bumi Aksara, Jakarta
- Santoso, dkk, 1989. Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Bali. Jurnal Penelitian Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
- Sumodiningrat G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat, Jaringan Pengamanan Sosial,